

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN

Oleh: A. Idham A. Pananrangi

ABSTRAK

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan penduduk yang cukup besar sekitar 3.567.897 orang pada tahun 2009. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan tahun 2005 sebesar 2.338.793. Masalah tingginya jumlah penduduk ini akan membawa kekhawatiran tersendiri diantaranya akan banyak pengangguran di Sumatera Selatan yang mencerminkan banyaknya penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup. Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Langkah yang diambil adalah dengan menambah investasi non fisik terutama pendidikan dan kesehatan. Investasi yang dilakukan cenderung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari tahun 1997 hingga 2009, jumlah investasi mengalami peningkatan. Investasi yang tertinggi dilakukan pada tahun 2009 sebesar 103.882 juta rupiah.

Berdasarkan hasil regresi bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu digunakan untuk mengatasi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi belum biasa memberikan pengaruh yang nyata terhadap pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan. Investasi pemerintah yang dilakukan di Sumatera Selatan belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan karena investasi yang dilakukan belum fokus pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, terutama sektor produktif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan, Penduduk

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama kurun waktu tertentu belum dapat menjadikan kondisi suatu daerah stabil. Secara makro pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk domestik bruto (PDB) yang berarti adanya peningkatan pendapatan daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur dalam menilai gambaran keberhasilan dari kebijakan pembangunan yang dilakukan di suatu daerah. Pertumbuhan itu sendiri merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang disertai aspek dinamis dalam suatu perekonomian.

Pada akhir tahun 1997 Indonesia mengalami krisis yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Krisis tersebut berpengaruh kepada seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1999, perekonomian Sumatera Selatan benar-benar mengalami kehancuran yaitu sebesar -11,43 persen.

Pada tahun 2000, keadaan perekonomian mulai membaik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 19,13 persen, yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama tahun pengamatan, tetapi dengan pertumbuhan yang besar ini tidak membuat jumlah penduduk miskin menurun tetapi cenderung meningkat hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan PDRB setiap tahunnya. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 7,05 pada tahun 2005, namun tingkat kemiskinan tidak menunjukkan penurunan, dan cenderung meningkat sampai ke angka 397.584 di tahun 2005. Selanjutnya angka kemiskinan terus meningkat sampai 465.398 di tahun 2006 dengan pertumbuhan kemiskinan sebesar 14,57 persen sedangkan pada saat pertumbuhan ekonomi hanya

4,8 persen. Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,25 persen dan diiringi kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 8, 10 persen.

Tabel 1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi Pemerintah Sumatera Selatan

Tahun	PDRB (dalam juta)	Pertumbuhan (%)	Investasi Pemerintah (dalam juta)
1997	38.145.141	6,16	75.656
1998	41.052.642	7,6	62.357
1999	42.997.136	4,7	139.751
2000	40.077.992	-6,7	140.439
2001	41.317.749	3,0	117.798
2002	42.337.430	2,4	432.980
2003	43.643.276	3,0	543.921
2004	45.247.401	3,7	660.754
2005	47.344.395	4,6	690.665
2006	49.634.518	4,8	876.654
2007	54.632.332	4,53	987.112
2008	65.694.360	6,83	991.901
2009	76.767.391	7,25	1.113.882

Sumber: Sumsel dalam angka, 2009

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan penduduk yang cukup besar sekitar 3.567.897 orang pada tahun 2009. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan tahun 2005 sebesar 2.338.793. Masalah tingginya jumlah penduduk ini akan membawa kekhawatiran tersendiri diantaranya akan banyak pengangguran di Sumatera Selatan yang mencerminkan banyaknya penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup.

Di Sumatera Selatan adanya pertambahan jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan angka kemiskinan. Dari tahun 1997 sampai 2009 cenderung meningkat sedangkan bila dilihat dari angka kemiskinan rata-rata angka adalah 175.425. Peningkatan angka kemiskinan yang signifikan terjadi pada tahun 2005 yang mencapai angka 3.338.793 yang sebelumnya hanya sebesar 2.312.551 pada tahun 2004. Dari tahun 2004 ke tahun 2005 adanya pertumbuhan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan sebesar 68.75 persen. Tahun 2007-2008, tingkat kemiskinan mengalami penurunan, namun di tahun 2009 meningkat kembali sebesar 8.10 persen.

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan barang dan uang untuk menjamin kelangsungan hidup. Chambers (dalam Suryawati: 2005,122) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Pengangguran atau golongan masyarakat miskin kurang mempunyai akses terhadap faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, tanah, dan entrepreneur. Dalam kegiatan ekonomi faktor produksi disinergikan untuk menciptakan nilai tambah, yang agregasinya merupakan produk domestik bruto (PDB) atau produk regional bruto (PDRB). Nilai tambah merupakan balas jasa faktor produksi yaitu tenaga kerja mendapatkan upah/gaji; modal penghasilan dividen; tanah memberikan sewa tanah, dan entrepreneur menghasilkan keuntungan. Nilai tambah tersebut dinikmati siapa saja yang mempunyai akses. Minimalnya akses penduduk miskin terhadap faktor produksi menyebabkan akses terhadap nilai tambah (PDRB) juga kecil.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu dengan penyesuaian kebijakan pengurangan kemiskinan sesuai dengan kondisi daerah, penciptaan lapangan kerja, pemusatan kebijakan sosial ekonomi dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Jakti, dalam Gatra, 17/10/03). Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian ekonomi makro adalah penambahan produk domestik bruto (PDB), yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi ada dua bentuk: *extensively* yaitu dengan penggunaan banyak sumber daya (seperti fisik, manusia atau *natural capital*) atau *intensively* yaitu dengan penggunaan sejumlah sumberdaya yang lebih efisien (lebih produktif). Ketika pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menggunakan banyak tenaga kerja, hal tersebut tidak menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Namun ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penggunaan sumberdaya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerja, hal tersebut menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup rata-rata masyarakat.

Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Langkah yang diambil adalah dengan menambah investasi non fisik terutama pendidikan dan kesehatan. Investasi yang dilakukan cenderung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari tahun 1997 hingga 2009, jumlah investasi mengalami peningkatan. Investasi yang tertinggi dilakukan pada tahun 2009 sebesar 103.882 juta rupiah.

Teori ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang menunjukkan semakin banyaknya output nasional mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja sehingga akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan namun kenyataannya kadang pertumbuhan ekonomi meningkat namun kemiskinan masih tetap tinggi.

Dari uraian latar belakang diatas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan.

B. TINJAUAN TEORITIS

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. "pertumbuhan" (*growth*) tidak identik dengan "pembangunan" (*development*). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier, 1989). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai "pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan". Menurut Boediono (1992) investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan

atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara menurut Todaro (1981) adalah:

- a. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;
- b. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;
- c. Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "capital formation" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi di bidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Suryana (2000) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut:

- a. Kecilnya jumlah mutlak kapita material;
- b. Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk;
- c. Rendahnya investasi netto.

Akibat keterbatasan tersebut, negara-negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumberdaya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (*vicious circle*) yang berpendapat bahwa: (1) ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup, (2) kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal, (3) taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan tiga faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di negara berkembang.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1997). Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa:

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol)
- d. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antar modal dan output (*Capital Output Ratio = COR*) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio*).

Teori ini memiliki kelemahan yakni kecendrungan menabung dan ratio penambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi

penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi.

Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal atau sumberdaya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumberdaya manusia di akumulasi. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.

Adanya pengeluaran publik disebabkan adanya kegagalan pasar. Adapun menurut Rao (1998) kegagalan pasar tersebut disebabkan karena : (1) Tidak semua barang dan jasa diperdagangkan, (2) Barang-barang yang menyebabkan eksternalitas dalam produksi maupun konsumsi memaksa suatu pertentangan antara harga pasar dengan penilaian sosial dan pasar, dan pasar tidak bisa memastikan untuk memenuhi kondisi yang diinginkan. (3) Beberapa barang mempunyai karakteristik *increasing returns to scale*. Dalam kondisi monopoli alami seperti itu masyarakat dapat memperoleh harga lebih rendah dan output lebih tinggi apabila pemerintah berperan sebagai produsen atau ada subsidi pada sektor swasta untuk menutup biaya karena memproduksi secara optimal. (4) Informasi asimetri antara produsen dan konsumen di bidang jasa seperti asuransi sosial dapat memberi peningkatan moral *hazard* dan pemilihan kurang baik Oleh karena itu intervensi negara diperlukan agar menjamin pendistribusian kembali pendapatan.

Mundle (1998) berpendapat bahwa kemajuan teori dan studi empiris mengenai intervensi kebijakan publik dalam pengembangan manusia mencerminkan tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan sosial. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

2. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai

kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah di bandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut.

Secara absolute, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada dibawah tingkat subsisten. Ukuran subsistensi tersebut dapat diproksi dengan garis kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memnuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut Sen (1999) kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut mencapai atau tidak.

Ketakberdayaan penduduk miskin, menurut Mubyarto (1997), disebabkan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang orang miskin ke luar dari lingkungan kemiskinan yang tak berujung pangkal.

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan (2005) menegaskan pentingnya mendefinisikan kemiskinan dari pendekatan hak. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak ini mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Para ahli ekonomi mengelompokkan ukuran kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut, diartikan sebagai suatu keadaan di mana tingkat pendaatan dari seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, permukiman, kesehatan, dan pendidikan. Ukuran ini terkait dengan batasan pada kebutuhan pokok atau kebutuha minimum. Sajogyo (1977) menyatakan bahwa untuk daerah perkotaan kebutuhan minimal perkapta setara dengan 420 kg beras per tahunnya, dan untuk daerah perdesaan 320 kg. Kemiskinan relatif berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif, seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin, karena apabila dibandingkan dengan penduduk sekitarnya ia memiliki pendaapatan yang lebih rendah.

Mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan telah dikemukakan dengan menggunakan teori pertumbuhan endogen pada bagian terdahulu. Manakala garis kemiskinan menjadi pertimbangan, maka inflasi menjadi variabel yang relevan. Sabagai ilustrasi: suatu rumah tangga yang memiliki pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan, ketika pertumbuhan pendapatannya sangat lambat-lebih rendah dari laju inflasi, maka barang dan jasa yang dapat dibelinya menjdi sedikit. Laju inflasi tersebut juga akan menggeserkan garis kemiskinan ke atas. Kombinasi dari pertumbuhan pandapatan yang lambat dan laju inflasi relatif tinggi akan menyebabkan rumah tangga tersebut jatuh kebawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya variabel untuk mengurangi kemiskinan; variabel lain, seperti laju inflasi, juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu di pastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti

diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor moderen seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

C. METODE PENELITIAN

1. Data

Dalam melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan data-data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber pada instansi pemerintah yang telah dipublikasikan dan data yang diolah kembali dari data sekunder yang diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) lembaga pemerintah yang diakui dan mempunyai legalitas dalam menerbitkan data statistik di Indonesia.

2. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan digunakan model regresi sederhana antara variabel independen dan variabel dependen. Secara umum hubungan antar variabel tersebut ditulis dengan persamaan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 G + \beta_2 I + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Tingkat kemiskinan

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = koefisien

G = pertumbuhan ekonomi

I = Investasi

ε = standar error

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat atau sensitifitas variabel bebas terhadap variabel terikat yang menunjukkan persentase pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

D. TEMUAN DAN DISKUSI

Perhitungan dengan menggunakan metode regresi berganda antara variabel pertumbuhan ekonomi (dependent), investasi (dependent) dan tingkat kemiskinan (independent) menghasilkan persamaan :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 G + \beta_2 I + \varepsilon$$

Hasil estimasi yang telah diperoleh dapat diketahui koefisien regresinya sebagai berikut:

Variabel		Standar error	t -hitung	t- tabel
Intercept	25,115	12,152	1,554	1,809
Pertumbuhan ekonomi	0,445	1,343	0,131	1,809
investasi	0,091	0,143	0,654	1,809
R = 0,340 R ² = 0,051				

Untuk mengetahui suatu model sudah baik atau adanya pelanggaran asumsi maka perlu dilakukan uji atau deteksi terhadap setiap pelanggaran asumsi tersebut. Dari hasil perhitungan telah dilakukan uji pelanggaran asumsi:

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metoda Dari hasil uji heteroskedastisitas diatas diketahui nilai probabilitas sebesar 0,249809. jika digunakan tingkat

kepercayaan 95 % ($\alpha=5\%$) maka nilai $\alpha=0,05$, maka $\alpha (0,05) < Probabilitas (0,249809)$ maka terima H_0 , artinya homokedastisitas (tidak ada Hetrokedastisitas).

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas maka dapat digunakan indicator yaitu R Square yang tinggi, kemudian Uji F signifikan dan Uji t signifikan semuanya. Gejala multikolenaritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIP. Dari perhitungan yang dilakukan variabel Pertumbuhan tolerance sebesar 0,923 dan VIP sebesar 1.123. Variabel investasi nilai tolerance sebesar 0,923 dan VIP 1.123. dari nilai yang diperoleh semua variabel dependen berada di sekitar 1 dan tolerance mendekati 1 sehingga dikatakan bahwa model penelitian ini terbebas dari gejala multikoleneritas.

Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka pengaruh variabel bebas terhadap varisbel terikat adalah signifikan. Sedangkan bila F hitung lebih kecil dari F tabel maka pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat adalah tidak signifikan.

Dari hasil pengujian diperoleh hasil F hitung sebesar 0,213 dan F tabel sebesar 4,541. Berarti nilai F hitung $< F$ tabel yaitu $0.213 < 4,541$ yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Uji t bertujuan untuk melihat tingkat signifikan masing-masing variabel bebas secara individu. Bila t statistic lebih kecil dari t tabel maka H_0 diterima berarti variabel bebas dan variabel terikat terpengaruh. Bila nilai t statistic lebih besar dari t tabel maka H_0 ditolak berarti antara variabel bebas dan variabel terikat terpengaruh.

Dengan derajat kepercayaan 95 persen ($\alpha=5$ persen). Nilai t tabel sebesar 1.809. Berdasarkan hasil perhitungan t hitung sebesar 1,131 berarti variabel ini mmepunyai nilai t hitung $< t$ tabel. Dengan kata lain bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak memberikann pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Selanjutnya untuk melihat variabel investasi pemerintah diperoleh nilai t hitung sebesar 0,654 sedangkan t tabel sebesar 1,809. Berarti nilai t hitung $< t$ tabel atau $0,654 < 1,809$. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan.

Untuk uji adanya autokorelasi maka dapat diketahui dengan melihat nilai statistic Durbin Watson (DW). Pengambilan keputusan pada uji autokorelasi adalah:

Jika $d_u < d < 4$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Jika $d_u < d_L$ dan $d > 4 - d_L$ maka terjadi outokorelasi.

Jika $d_L \leq d \leq d_u$ dan $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$ maka tidak dapat dideteksi.

Estimasi yang telah dilakukan diperoleh nilai D-W (d) sebesar 2,246 sementara nilai DW dari tabel statistic pada $\alpha = 0,05$ diperoleh batas bawah $d_L = 0,786$, batas atas $d_u = 1,654$, nilai $4 - d_u = 2,354$ dan nilai $4 - d_L = 3,303$. Sehingga dapat diketahui bahwa $d_u < d < 4 - d_u$ atau $1,654 < 2,246 < 2.354$ dan tidak terjadi autokorelasi.

Koefisien determinan menjelaskan proporsi atau persentasi sumbangan variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat. Dari hasil penelitian diperoleh nilai 0,051 atau 5,1 persen . hal ini berarti bahwa sebesar 5,1 persen tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi sedangkan sebesar 94,9 persen dipengaruhi variabel lain di luar model.

Pengaruh Variabel Lain Lebih Dominan

Dari hasil pengujian diperoleh hasil F hitung sebesar 0,213 dan F tabel sebesar 4,541. Berarti nilai F hitung $< F$ tabel yaitu $0.213 < 4,541$ yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,051 atau 5,1 persen yang berarti bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan dipengaruhi pertumbuhan ekonomi dan investasi sebesar 5,1 persen sedangkan sisanya sebesar 94,9 persen dipengaruhi factor lain diluar model.

Faktor-faktor lain yang diperkirakan turut mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan antarlain inflasi dan angka melek huruf. Adanya inflasi menyebabkan harga kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan dan di satu sisi banyak usaha yang gulung tikar karena meningkatnya ongkos produksi. Perusahaan atau uasah kecil yang gulung tikar menambah tingkat penganggura di Sumatera sekatan yang kakn mempengaruhi daya beli masyarakat dan menambah jumlah penduduk miskin. Angka melek huruf diperkirakan turut andil mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan. Tingginya angka melek huruf ini dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas dan kompetisi mereka di dunaia kerja.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu dapat ditarik kesimpulan:

- a. Berdasarkan hasil regresi bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu digunakan untuk mengatasi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan juga adanya factor lain yang turut mempebngaruhi kemiskinan di Sumatera Selatan diantaranya inflasi. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi belum biasa memberikan pengaruh yang nyata terhadap pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan.
- b. Investasi pemerintah yang di lakukan di Sumatera Selatan belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan karena investasi yang dilakukan belum fokus pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pengentasan kemiskian, terutama sektor produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari segi gizi maupun keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, 1999, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama. Cetakan I, BPFE; Yogyakarta
- Badan Pusat Statistisk Provinsi Sumatera Selatan 2009. Sumatera Selatan dalam angka. Palembang.BPS
- Brata, Gunai Aloysius, 2005. Investasi Sektor Public Lokal Pembangunan Manusia dan Kemiskinan. Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Gujarati, Damora. 1978. Ekonomitrika Dasar, Erlangga
- Mankiw. Gregory. 2003. Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Erlangga Jakarta.
- Rustiono, dedy, Analisis Pengaruh Investasi , Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa tengah, Universitas Diponegoro
- Siregar, Hermanto, 2006, Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin, IPB & Brighten Institute
- Suryawati, Chriswardani, 2005, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, JMPK, Vol. 08, No. 03. Universitas Diponegoro
- Susetyo, Didiek. 2001. Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi; Kajian Ekonomi dan Bisnis Vol.3 No.1 Tahun 2001, Universitas Sriwijayaal Sudirman.
- Suyitno, 1987, Beberapa Indikator Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Daerah kabupaten Banyumas, Purwokerto, FE, Unibversitas Jndr
- Tambunan, Tulus, 2004, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia, Kajian Ekonomi, Vol.03, No. 02, Universitas Sriwijaya.
- Todaro, P.Michel, 1988, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Gelora Aksara Pertama, Jakarta.

Wadud, Muhammad, 2003, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin, Kajian Ekonomi, Vol. 02, No. 01, Universitas Sriwijaya

Wijoyo Wirjo, Wiloejo, 2005, Jurnal Manajemen dan Fiskal Volume V no.2, Jakarta